

FAKTOR KOMUNIKASI DALAM ANALISIS IMPLEMENTASI STRATEGI PERTAHANAN LAUT MENGHADAPI ANCAMAN DI PERAIRAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

COMMUNICATION FACTORS IN ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF SEA DEFENSE STRATEGY TO TAKE THREATS IN SOUTH SULAWESI PROVINCE

Andryan Teguh Kelana Ole¹, Mohamad Rachmad²

Program Studi Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas
Pertahanan

(spl6ole@gmail.com, moat_1402@yahoo.com)

Abstrak – Penelitian yang dilaksanakan di provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), dengan tema Strategi Pertahanan Laut Menghadapi Ancaman di Perairan Provinsi Sulawesi Tenggara, bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat strategi pertahanan laut (SPL) provinsi Sultra dalam menghadapi ancaman-ancaman yang ada di laut wilayah provinsi Sultra, seperti; 1) ancaman demografi dengan masuknya tenaga kerja asing, utamanya dari China, yang bekerja di dua tambang nikel besar di Morowali (PT. IMIP) dan di Konawe (PT. VDNI); 2) ancaman geografi dari dan melalui wilayah laut provinsi Sultra dalam bentuk penyelundupan balpres atau rombongan, narkoba dari Timur Leste, dan jalur lintas *Foreign Terrorist Fighters (FTF)* dari Nusa Tenggara Barat – Poso – Filipina; dan 3) ancaman sumber daya yang disebabkan penguasaan tambang nikel oleh asing/China dan keluar masuknya hasil tambang melalui laut wilayah provinsi Sultra. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi yaitu melalui pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara *in-depth interview* (wawancara mendalam), data sekunder, dan observasi langsung ke lapangan. Informan atau narasumber yang diwawancarai berasal dari instansi-instansi sipil pemerintahan daerah dan militer di Kendari serta informan-informan lepas atau noninstansi yang merupakan masyarakat Kendari dari berbagai kalangan. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik George C. Edwards III (1980) dengan mengedepankan faktor komunikasi dan subfaktor-subfaktor yang ada di dalamnya, yaitu *transmission* atau penyebaran, *clarity* atau kejelasan, dan *consistency* atau konsistensi. Kesimpulan yang didapat adalah masih adanya masalah dalam faktor komunikasi untuk strategi pertahanan laut di provinsi Sultra sehingga dapat berdampak buruk bagi provinsi Sultra secara sektoral kedaerahan, Indonesia secara nasional, dan negara-negara kawasan.

Kata Kunci: Ancaman, Faktor Komunikasi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Strategi Pertahanan Laut

Abstract - This research was conducted in Southeast Sulawesi province (SSP). It aims to find out how strong the sea defense strategy (SPL) of SSP is in dealing with threats that exist at its sea or territorial waters, as; 1) demographic threat with the influx of foreign workers, mainly from China, working in two large nickel mines in Morowali (PT. IMIP) and in Konawe (PT. VDNI); 2) geographic threat from and through the Southeast Sulawesi sea area in the form of smuggling balpres (used clothing), narcotics from East Timor, and the Foreign Terrorist Fighters (FTF) passage from West Nusa Tenggara - Poso - Philippines; and 3) resource threats caused by foreign/Chinese control of nickel mines and the entry and exit of mining products through the sea of SSP region. The method used is qualitative with a phenomenological approach. The data collection technique is conducted by triangulation, namely

¹ Program Studi Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

² Program Studi Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

through primary data collection which is done by in-depth interviews, secondary data, and direct observation to the field. The informants interviewed came from local government and military civilian institutions in Kendari as well as freelances or non-institutional informants who were Kendari people from various backgrounds. The theory used is the theory of public policy implementation of George C. Edwards III (1980) by prioritizing communication factor and subfactors, namely transmission, clarity, and consistency. The conclusion obtained is that there are still problems in the communication factor for the sea defense strategy in SSP so that it can have negative impacts on SSP, Indonesia, and regional countries.

Keywords: Communication Factor, Sea Defense Strategy, Southeast Sulawesi Province, Threats

Pendahuluan

Pada hakikatnya, pertahanan Negara Republik Indonesia adalah upaya-upaya pertahanan yang bersifat semesta. Penyelenggaraan pertahanan negara tersebut didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan terhadap kekuatan sendiri. Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta berarti melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional yang disiapkan secara dini oleh negara dan pemerintah serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Struktur kekuatan sistem ini dibangun berdasarkan sifat ancaman yang dihadapi seperti ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Ancaman militer dapat berupa ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara atau ancaman bersenjata yang berasal dari gerakan kelompok

bersenjata, yang dinilai mengancam dan/atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut atau udara, serta perang saudara atau konflik komunal yang sewaktu-waktu dapat timbul.

Ancaman nonmiliter pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa. Ancaman nonmiliter dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada dalam kategori miskin, berpendidikan rendah, dan terbelakang membawa dampak terhadap keamanan yang cukup signifikan dan bersifat multidimensi. Oleh



Gambar 1. Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara

karena itu, ancaman nonmiliter dimasukkan ke dalam golongan ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, informasi dan teknologi serta keselamatan umum.

Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terletak di sebelah tenggara pulau Sulawesi dengan ibukota Kendari. Pada awalnya, Sultra merupakan nama salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra) dengan Baubau sebagai ibukota kabupaten. Sultra ditetapkan sebagai Daerah Otonom berdasarkan Perpu No. 2 tahun

1964 Juncto UU No.13 Tahun 1964. Realisasi terbentuknya Provinsi atau Daerah Tingkat I Sultra dilakukan pada tanggal 27 April 1964. Provinsi Sultra terletak di jazirah tenggara pulau Sulawesi, dan lebih tepatnya secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa di antara $02^{\circ}45'$ – $06^{\circ}15'$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}45'$ – $124^{\circ}30'$ Bujur Timur serta memiliki wilayah daratan seluas 38.140 km^2 ($3.814.000 \text{ ha}$)

³ Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2019. (2019). In Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. Retrieved from <https://sultra.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NzU1OWZmOGQ0ZjY3ZTBiZW>

FkZjJiZTFj&xzmn=aHRocHM6Ly9zdWxocmEuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2FoaW9uLzlwMTkvMDgvMTYvNzU1OWZmOGQ0ZjY3ZTBiZWFKZjJiZTFjL3Byb3ZpbmNpLXN1bGF3ZXNpLXRlbn dnYXJhLWRhbGFTLWFuZ2thLTlwMTkua

Tabel 1. Ancaman Faktual dan Potensial di Provinsi Sulawesi Tenggara

NO	ANCAMAN	FAKTUAL	POTENSIAL
1.	Demografi	Keberadaan TKA China	Keberadaan TKA China
2	Geografi	Ancaman dari laut penyelundupan balpres, narkoba dari Timor Leste, dan jalur lintas Foreign Terrorist Fighters (FTF) dari NTB ke Poso dan Filipina	Sebelah Timur Sultra terdapat ALKI III. Sedangkan di sebelah selatan Sultra berbatasan dengan Timor Leste.
3	Sumber daya	Eksploitasi tambang	Penguasaan bahan tambang nikel oleh asing/China.
4	Ideologi	Adanya aliran HTI	Diduga terus berkembang diam-diam dan mengumpulkan kekuatan.
5	Politik	Politik identitas	Akar HTI masih hidup dengan nama berbeda dan sedang menggalang kekuatan.
6.	Ekonomi	Dominasi asing/China di proyek tambang	Penguasaan sumber daya alam oleh asing.
7.	Sosial budaya	Tenaga kerja asing asal China menikah dengan penduduk lokal.	Dijadikan budak di China.
8.	Pertahanan dan keamanan	- Perkelahian antar 2 desa di Buton, 75 Rumah terbakar dan 2 tewas. - Ancaman militer rendah, tetapi ancaman nonmiliter tinggi.	Ancaman nonmiliter berupa kejahatan lintas negara sangat besar: (18 Jenis) sesuai UU no.5 Tahun 2009

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2020

dan perairan (laut) seluas 110.000 km² (11.000.000 ha)⁴.

Luas wilayah laut provinsi Sultra, yang hampir 2/3 lebih luas dari keseluruhan wilayahnya, tentu membawa tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi Sultra untuk mengelolanya demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Sultra. Selain pengelolaannya, ancaman-ancaman di laut provinsi Sultra juga sangat perlu dipetakan dan dipahami dengan baik karena pasti akan berdampak buruk terhadap salah satu sumber kehidupan

masyarakat provinsi Sultra yang berasal dari dan melalui laut. Di provinsi Sulawesi Tenggara setidaknya terdapat delapan bentuk ancaman nonmiliter yang harus di waspandai, diantaranya ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ancaman terhadap IT, dan ancaman legislasi. Secara spesifik, ancaman-ancaman di dan melalui laut provinsi Sultra adalah lingkungan hidup, balpres, penyelundupan nikel, narkoba, terorisme, tenaga kerja asing, perdagangan manusia, dan imigran gelap. Terkait dengan ancaman-ancaman tersebut,

⁴ Sejarah Provinsi Sulawesi Tenggara. (2020).

Retrieved from <http://sultraprov.go.id/sejarah>

dituntut sinergi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan *stakeholder-stakeholder* terkait di provinsi Sulawesi Tenggara.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Creswell, pendekatan fenomenologi adalah desain penelitian yang berasal dari filsafat dan psikologi di mana peneliti menggambarkan pengalaman seseorang tentang suatu fenomena yang terjadi seperti yang dijelaskan oleh partisipan atau informan penelitian.⁵ Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi yaitu melalui pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara *in-depth interview* (wawancara mendalam), data sekunder berupa dokumentasi rekaman suara dan foto/gambar, dan observasi langsung ke lapangan.⁶ Informan atau narasumber yang diwawancarai berasal dari instansi-instansi sipil pemerintahan daerah dan militer di Kendari serta informan-informan lepas atau noninstansi yang merupakan masyarakat Kendari dari

beragam kalangan. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik George C. Edwards III dengan mengedepankan faktor komunikasi dan subfaktor-subfaktornya, yaitu *transmission/transmisi/penyebaran*, *clarity/kejelasan*, dan *consistency/konsistensi*.⁷

Hasil dan Pembahasan

Pertahanan negara harus menjadi tanggung jawab seluruh entitas bangsa dan negara. Hal yang sama harus diterapkan juga di provinsi Sultra yang wilayah lautnya lebih luas dari daratannya. Oleh karena itu dibutuhkan strategi pertahanan laut yang kuat untuk dapat mengatasi ancaman-ancaman di wilayah laut provinsi Sultra dengan melibatkan entitas-entitas pemerintahan sipil maupun militer di Sultra yang memiliki peran strategis. Secara sederhana, strategi didefinisikan sebagai sasaran atau tujuan (*ends*) yang ingin dicapai kemudian disinergikan dengan cara (*ways*) yang merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan didukung dengan sarana (*means*) serta sumber daya untuk tercapainya

⁵ John W. Creswell. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc.

⁶ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, &

Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.

⁷ George C. Edwards III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional

sasaran atau tujuan tersebut.⁸ Untuk itu strategi pertahanan laut di provinsi Sultra harus selalu ditujukan untuk mencapai tujuan utama yaitu kesejahteraan dan keamanan masyarakat Sultra sehingga berdampak pada kesejahteraan dan keamanan seluruh rakyat Indonesia. Walaupun provinsi Sultra secara umum dalam kondisi yang relatif kondusif, kesadaran pemerintah daerah beserta perangkatnya dan seluruh masyarakat Sultra terhadap ancaman faktual maupun potensial yang mungkin timbul harus tetap tinggi.

Penelitian ini kemudian dilaksanakan di entitas-entitas atau instansi-instansi terkait di Sultra, seperti Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Pangkalan TNI AL (Lanal), Komando Resor Militer (Korem), Kepolisian Daerah (Polda), Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kantor Imigrasi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dan Kantor Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC).

Untuk menjaga integritas dan kerahasiaan maka setiap informan atau partisipan penelitian diberikan kode. Sepuluh entitas atau instansi tersebut dengan sengaja dipilih oleh peneliti karena diyakini mempunyai andil yang besar dalam pertahanan dan keamanan laut Sultra.

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kesbangpol adalah merumuskan kebijakan-kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik, melaksanakan pembinaan, memfasilitasi serta melaksanakan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, dan politik dalam negeri di lingkup provinsi dan kabupaten/kota.⁹ Segala permasalahan yang berada di laut wilayah provinsi Sultra berasal dan berakhir di wilayah darat provinsi Sultra dan dapat dipastikan mempengaruhi stabilitas provinsi Sultra secara keseluruhan. Oleh karena itu, Dinas Kesbangpol provinsi Sultra memainkan

⁸ Arthur F. Lykke Jr. (1989). Defining Military Strategy. *Military Review*, LXIX(5), 2–8. Retrieved from <http://cgsc.contentdm.oclc.org/cdm/singleitem/collection/p124201coll1/id/504/rec/10>

⁹ Silaturahmi Pemprov Sultra Dengan Tokoh Masyarakat, Mahasiswa dan Pelajar Serta

Lembaga Perempuan. (2019). Retrieved March 9, 2020, from Provinsi Sulawesi Tenggara website: http://sultraprov.go.id/berita/silaturahmi_pemprov_sultra_dengan_tokoh_masyarakat_mahasiswa_dan_pelajar_serta_lembaga_perempuan

peran yang sangat vital dalam menjaga stabilitas ideologi dan politik demografi Sultra melalui upaya-upaya dan pelayanan-pelayanan yang diberikan.

Lanal Kendari merupakan satuan militer di bawah Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI Makassar dan Komando Armada II. Tugas pokok Lanal Kendari yaitu menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur TNI AL serta Komando Utama (Kotama) TNI AL lainnya dan pembinaan potensi maritim guna menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan negara di laut serta tugas-tugas lainnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Komandan Lantamal VI, Panglima Komando Armada II, dan Kepala Staf TNI AL.¹⁰ Lanal Kendari memiliki peran yang sangat penting dalam pengamanan laut Sultra dan pembinaan serta pemberdayaan potensi maritim Sultra. Peran tersebut dilaksanakan tidak hanya untuk tujuan pertahanan saja, tetapi juga untuk tujuan keamanan maupun untuk tujuan ekonomi dalam hal menyejahterakan masyarakat pesisir

Sultra. Outcome yang diharapkan dari penguatan ekonomi masyarakat pesisir Sultra adalah kokohnya ketahanan ekonomi provinsi Sultra sehingga memberikan dampak positif terhadap keamanan dan pertahanan provinsi Sultra dan negara.

Komando Resor Militer (Korem) 143/Halu Oleo berada dibawah Komando Daerah Militer (Kodam) XIV Hasanudin yang memiliki tugas pokok sebagai komando pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat di provinsi Sultra.¹¹ Dalam melaksanakan pembinaan teritorialnya, Korem 143/Halu Oleo menyelenggarakan segala upaya, perencanaan dan pengembangan, serta pengerahan dan pengendalian potensi geografis, demografis, dan kondisi sosial dengan segenap aspek-aspeknya guna menjadi kekuatan yang meliputi ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara pada umumnya dan keamanan serta perta pertahanan provinsi Sultra pada khususnya. Pembinaan masyarakat yang dilaksanakan selama ini sangat penting

¹⁰ Dispen Lantamal VI. (2020). Komandan Lanal Kendari Memimpin Penyambutan Kedatangan KRI Fatahilih-361 di Kendari. Retrieved March 9, 2020, from <https://koarmada2.tnial.mil.id/2019/04/03/komandan-lanal-kendari-memimpin-penyambutan-kedatangan-kri-fatahilih-361-di-kendari/>

¹¹ Penrem 143/HO. (2020). Sejarah Korem 143/Halu Oleo. Retrieved March 9, 2020, from Korem 143/Halu Oleo website: <http://korem143.kodam14hasanuddin-tniad.mil.id/sejarah-2/>

guna mendukung stabilas situasi di lingkungan provinsi Sultra dari ancaman-ancaman dan gangguan-gangguan yang terjadi atau bersumber dari wilayah laut maupun wilayah darat provinsi Sultra.

Kepolisian Daerah (Polda) Sultra dan Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Polda Sultra adalah pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di wilayah provinsi Sultra. Polda Sultra merupakan Polda yang tergolong tipe B dan dikepalai oleh perwira Polisi berbintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polda Sultra memiliki 10 Kepolisian Resor (Polres) di bawah jajarannya dan sebagian besar adalah wilayah kepulauan dan sebagai pembina keamanan masyarakat. Tupoksi Polda Sultra adalah meningkatkan upaya-upaya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan menegakkan serta kepatuhan hokum masyarakat provinsi Sultra. Ditpolair Polda Sultra dipimpin oleh Direktur Kepolisian Perairan (Dirpolair) yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dalam pelaksanaan tugasnya, Ditpolair banyak melibatkan

patroli laut yang menangani pelanggaran-pelanggaran dan penyelundupan dikawasan perairan Sultra. Sejak era reformasi dimulai pada tahun 1999, tugas Polri, termasuk Polda Sultra, dalam fungsinya sebagai aparaturnegara dalam menjaga dan menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi sangat penting. Pertahanan dan ketahanan provinsi Sultra dalam menghadapi ancaman-ancaman di wilayah darat dan laut atau perairan tidak dapat dicapai apabila keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakkan hukum di porvinsi Sultra tidak terwujud.

Secara struktur organisasi, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Tupoksi KSOP Kelas II Kendari adalah melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang-bidang yang terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan-kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan di provinsi Sultra dan Kendari sebagai ibukota provinsi Sultra. Keluar masuk

kapal-kapal yang tercatat di KSOP Kelas II Kendari setiap tahunnya berkisar 5.500an kapal dalam negeri dan kapal luar negeri yang berbendera dari berbagai negara asing termasuk kapal-kapal berbendera China yang keluar masuk membawa hasil tambang nikel dari PT. IMIP dan PT. VDNI di perairan provinsi Sultra (Kemenhub RI, 2020). Strategi pertahanan laut di provinsi Sultra tidak bisa mengesampingkan peran penting KSOP Kelas II Kendari. Apabila KSOP Kelas II Kendari tidak melaksanakan tupoksinya dengan baik, kerawanan-kerawanan yang terkait dengan keamanan dan keselamatan pelayaran yang terjadi di alur pelayaran provinsi Sultra serta penyelundupan-penyulundupan manusia, mineral dan batubara (minerba) atau bahan mentah minerba, narkoba dan bahan pembuatan narkoba, balpres, sembilan bahan pokok (sembako), dan lain-lain di dan melau perairan provinsi Sultra dapat terjadi dengan mudah. Hal-hal tersebut di atas tentu dapat mengancam keselamatan jiwa masyarakat provinsi Sultra, ketahanan ekonomi dan pangan provinsi Sultra, dan bahkan kedaulatan negara.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia provinsi Sulawesi Tenggara. Tugas pokok dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari yaitu melaksanakan sebagian tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bidang keimigrasian di wilayah laut dan daratan Sulawesi Tenggara. Selain itu, tupoksi yang diemban oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari adalah melaksanakan tugas-tugas keimigrasian di bidang informasi dan sarana-sarana komunikasi keimigrasian, melaksanakan tugas-tugas keimigrasian di bidang lalu lintas keimigrasian, melaksanakan tugas-tugas keimigrasian di bidang status keimigrasian, melaksanakan tugas-tugas keimigrasian di bidang pengawasan serta penindakan keimigrasian, dan melaksanakan tugas-tugas keimigrasian di bidang pendaratan udara, laut, dan darat serta pemberian izin masuk keimigrasian.¹² Dengan terdapatnya dua tambang nikel besar beserta smelter-smelternya di provinsi Sultra, yang dioperasikan oleh perusahaan-

¹² Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari. (2020). Tugas dan Fungsi Imigrasi. Retrieved March 9, 2020, from Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari

website:
<https://kendari.imigrasi.go.id/index.php/profil/tugas-fungsi>

perusahaan besar milik warga negara China yaitu PT. IMIP dengan luas 2.000 hektare di kabupaten Morowali dan PT. VDNI dengan luas kurang lebih 7.00 hektare di kabupaten Konawe, arus datangnya tenaga kerja asing (TKA) asal China semakin besar. Untuk itu diperlukan pengawasan, pemberian izin, dan penindakan keimigrasian terhadap TKA-TKA tersebut. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari pada hakikatnya tidak hanya sekedar melaksanakan tupoksi keimigrasian di tingkat provinsi, tapi juga menentukan dampaknya terhadap ketenagakerjaan dan kedaulatan demografis negara secara nasional dengan secara ketat memberikan izin keluar masuk, izin tinggal, izin kerja, dan memulangkan TKA-TKA yang sudah habis izin kerja maupun izin tinggalnya di provinsi Sultra.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) provinsi Sultra merupakan kepanjangan tangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di daerah. Tupoksi DLH provinsi Sultra adalah membantu Bupati-Bupati di provinsi Sultra melaksanakan urusan-

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan pembantuan di bidang lingkungan hidup. Tupoksi lainnya adalah sebagai perumus dan pelaksana kebijakan di bidang lingkungan hidup, melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, serta melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati-Bupati di provinsi Sultra terkait bidang lingkungan hidup.¹³ Kerusakan lingkungan hidup di wilayah darat provinsi Sultra, yang diakibatkan oleh bencana alam maupun ulah manusia seperti kegiatan penambangan, akan mencemari perairan provinsi Sultra dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat provinsi Sultra. Hal ini kemudian akan mempengaruhi dan memperlemah ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pesisir atau yang tinggal di dekat perairan. *Outcome* dari kerusakan lingkungan adalah lemahnya keamanan dan kemudian mempengaruhi pertahanan provinsi Sultra. Peran DLH provinsi Sultra menjadi penting karena harus mampu meminimalisir kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh

¹³ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara. (2020). Tupoksi. Retrieved March 9, 2020, from Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Sulawesi Tenggara website:
http://dlh.sultraprov.go.id/?page_id=163

bencana alam maupun ulah manusia sehingga tidak memiliki dampak negatif terhadap ketahanan, keamanan, dan/atau pertahanan provinsi Sultra.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Kendari merupakan kepanjangan tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di provinsi Sultra. Tupoksi DKP Kota Kendari adalah meningkatkan pembinaan serta pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, meningkatkan produksi dan produktivitas hasil perikanan, meningkatkan kualitas serta daya dukung lingkungan sehingga pembangunan ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan dapat berlangsung secara berkesinambungan, memberdayakan masyarakat secara efektif dalam mengelola potensi-potensi sumber daya kelautan dan perikanan secara terpadu serta berkelanjutan, meningkatkan taraf kesejahteraan hidup dan kemandirian para nelayan dan pembudidaya ikan, meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), meningkatkan fungsi kelembagaan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan, serta meningkatkan

kompetensi, kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) para aparatur kelautan dan perikanan di provinsi Sultra.¹⁴ DKP Kota Kendari sama pentingnya dengan DLH provinsi Sultra, yaitu menjaga ketahanan ekonomi dan pangan yang bersumber dari perairan provinsi Sultra, terutama yang berasal dari laut. Kegiatan-kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, seperti penggunaan bahan peledak atau bom ikan dan lain-lain, yang masih terjadi di perairan provinsi Sultra menjadi tantangan tersendiri bagi DKP Kota Kendari karena hampir 2/3 luas wilayah provinsi Sultra adalah laut. Dapat dipastikan salah satu ruang hidup dan sumber pangan masyarakat provinsi Sultra berasal dari laut, sehingga pengelolaan laut dengan baik dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan berdampak positif bagi keamanan dan pertahanan provinsi Sultra.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe Madya Pabean C Kendari adalah kepanjangan tangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai yang merupakan salah satu Ditjen di Kementerian Keuangan Republik

¹⁴ Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari. (2020). Tujuan. Retrieved March 9, 2020, from Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari

website:
kendari.info/halaman/tujuan

<https://dkp->

Indonesia (Kemenkeu RI). Tupoksi KPPBC tipe Madya Pabean C Kendari adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Kemenkeu RI di bidang kepabean dan cukai berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kemenkeu RI serta mengamankan kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan lalu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk serta cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, fungsi KPPBC tipe Madya Pabean C Kendari adalah sebagai *trade facilitator*, yaitu memberi fasilitas perdagangan, termasuk diantaranya melaksanakan tugas titipan dari instansi lain; *industrial assistance*, yaitu melindungi industri-industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri-industri sejenis dari luar negeri; *community protector*, yaitu melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya seperti narkoba, senjata api, bahan peledak, dan lain-lain; dan *revenue collector*, yaitu memungut bea masuk dan bea keluar serta cukai secara maksimal dan kemudian

memasukkannya dalam kas negara atau provinsi.¹⁵ Tugas yang diemban oleh KPPBC tipe Madya Pabean C Kendari tidak hanya untuk mendapatkan *revenue* atau pendapatan finansial dari bea masuk dan bea keluar serta cukai barang, tetapi juga memastikan tidak terjadinya penyelundupan-penyelundupan dari dan melalui perairan provinsi Sultra terutama *transnational organized crime* (TOC) melalui laut provinsi Sultra. Dengan patroli-patroli yang digelar oleh satuan-satuan KPPBC tipe Madya Pabean C Kendari, sekalipun tujuannya adalah untuk memeriksa barang yang keluar masuk perairan provinsi Sultra, kegiatan-kegiatan ilegal yang terkait dengan TOC, seperti *human trafficking* (perdagangan manusia: perekrutan, pengiriman, dan/atau penampungan manusia dengan menggunakan ancaman dan/atau kekerasan demi tujuan eksploitasi, pelacuran, seks, dan penyalahgunaan kekuasaan serta perbudakan), *people smuggling* (penyelundupan manusia) dapat diminimalisir. *Outcome* dari pelaksanaan tupoksi KPPBC tipe Madya Pabean C Kendari di perairan provinsi Sultra tidak hanya semakin kuatnya

¹⁵ Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Kendari. (2020). Tugas dan Fungsi DJBC. Retrieved March 9, 2020, from Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Kendari website:
http://bckendari.id/Pages/tugas_fungsi

keamanan dan pertahanan provinsi Sultra, tapi juga meningkatnya keamanan dan pertahanan negara.

Kesepuluh entitas atau instansi di provinsi Sultra tersebut diatas memiliki peran yang sama pentingnya dalam pelaksanaan strategi pertahanan laut di provinsi Sultra. Hal ini akan berimplikasi positif pada kuatnya kedaulatan dan ketahanan provinsi maupun ketahanan nasional yang didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai keuletan, daya tahan, kemampuan, dan kekuatan yang menjadi tujuan bangsa Indonesia dalam rangka menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang berasal dari luar maupun dari dalam provinsi/negeri, yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.¹⁶

Harold D. Lasswell dalam artikelnya yang berjudul *The Structure and Function of Communication in Society* mendefinisikan model komunikasi sebagai suatu tindakan nyata berkomunikasi dan

menjabarkannya menjadi lima faktor dasar yaitu siapa yang mengatakannya (*Who*), mengatakan apa (*Says What*), dalam atau menggunakan saluran apa mengatakannya (*In Which Channel*), kepada siapa mengatakannya (*To Whom*), dan dengan efek apa mengatakannya (*With What Effect*).¹⁷ Walaupun sederhana, model komunikasi beserta lima faktor tersebut dapat diterapkan secara efektif oleh kesepuluh entitas atau instansi di atas. Meskipun kesepuluh informan atau narasumber (informan/narasumber A1, C1, B1, B2, B3, B4, C2, C3, C4, C5) yang berasal dari instansi-instansi tersebut merasa yakin bahwa tidak ada masalah dalam komunikasi, tetapi kenyataannya tindak pelanggaran hukum dan/atau kejahatan di dan melalui perairan provinsi Sultra masih terjadi dan meningkat tajam khususnya pada jumlah kasus narkoba yang berjumlah 170 kasus di tahun 2017 menjadi 288 kasus di tahun 2018.¹⁸

¹⁶ KBBI. (2020). Tahan. Retrieved March 10, 2020, from <https://kbbi.web.id/tahan>

¹⁷ Harold D. Lasswell. (1948). *The structure and function of communication in society*. Retrieved from <http://www.irfanerdogan.com/dergiweb2008/24/12.pdf>

¹⁸ Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2019. (2019). In *Badan Pusat Statistik Provinsi*

Sulawesi Tenggara. Retrieved from <https://sultra.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NzU1OWZmOGQoZjY3ZTBiZWFKZjJiZTFj&xzmn=aHRocHM6Ly9zdWxocmEuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2FoaW9uLzlwMTkvMDgvMTYvNzU1OWZmOGQoZjY3ZTBiZWFKZjJiZTFjL3Byb3ZpbmNpLXN1bGF3ZXNpLXRlbnRnYXJhLWRhbGFTLWFuZ2thLTlwMTkua>

Kepolisian Resort Departmental (Resort) Police Office	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Polres Buton	12	5	1	3	2
Polres Muna	4	14	8	12	24
Polres Konawe	24	3	15	8	17
Polres Kolaka	5	15	28	18	23
Polres Konawe Selatan	23	21	5	4	10
Polres Bombana	34	46	8	10	14
Polres Wakatobi	4	5	1	1	4
Polres Kolaka Utara	14	17	17	11	14
Polres Buton Utara	-	-	-	-	-
Polres Konawe Utara	-	-	-	-	-
Polres Kolaka Timur	-	-	-	-	-
Polres Konawe Kepulauan	-	-	-	-	-
Polres Muna Barat	-	-	-	-	-
Polres Buton Tengah	-	-	-	-	-
Polres Buton Selatan	-	-	-	-	-
Polres Kendari	27	24	23	30	82
Polres Baubau	58	20	12	8	18
Dit Res Narkoba POLDA Sultra	40	40	64	65	80
Sulawesi Tenggara	245	210	182	170	288

Catatan/Notes: Daerah Pemekaran yang belum memiliki Kantor Polres, datanya masih tergabung di induk kabupatennya/
Expansion Regions that do not have Police Office, the data is still incorporated in the parent district

Sumber/Source: Direktorat Reserse Narkoba POLDA Sulawesi Tenggara

Gambar 2. Jumlah Kasus Narkoba Menurut Kabupaten/Kota di Prov. Sultra, 2014–2018
Sumber: BPS Prov. Sultra

Pentingnya komunikasi antar entitas, institusi, atau *implementer* kebijakan publik di lapangan secara lebih gamblang dijelaskan oleh George C. Edwards III. Menurut Edwards, implementasi yang berjalan efektif hanya akan bisa terlaksana apabila para pembuat dan pelaksana keputusan di lapangan (*implementer*) mengetahui apa yang akan dan harus dikerjakan melalui informasi-informasi yang didapat melalui komunikasi yang intens, dan memenuhi tiga kriteria subfaktor model teori

Edwards III; transmisi (penyaluran) komunikasi, kejelasan komunikasi, dan konsistensi komunikasi. Secara sederhana, permasalahan yang terlihat dengan jelas di lapangan adalah kemiripan para informan/narasumber dalam memberikan tanggapan dan jawaban bahwa komunikasi antar instansi-instansi tersebut berjalan dengan baik melalui beberapa saluran (*channel*), seperti kegiatan-kegiatan rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), minum kopi

¹⁹ *Ibid*

bersama (*coffee morning*), *Focus Group Discussion* (FGD), diskusi di WhatsApp (WA) group, dan lain-lain. Merujuk pada keterangan para informan/narasumber bahwa tidak ada masalah dan kendala dalam berkomunikasi, maka hipotesis awal yang dapat diambil adalah apabila seluruh kegiatan tersebut di atas telah dilaksanakan, maka seharusnya angka kejahatan dan pelanggaran hukum termasuk tindak pidana narkoba semakin mengecil atau sedikit.

Masalah komunikasi antar sepuluh instansi di provinsi Sultra tersebut terlihat dengan jelas dalam tiga subfaktor komunikasi Edwards III:

1. Transmisi (penyaluran) komunikasi. Implementasi yang baik hanya dapat dihasilkan apabila informasi disalurkan dengan baik sehingga tindakan yang cepat dan tepat dapat dilakukan oleh oleh instansi-instansi tersebut sesuai kewenangannya masing-

masing. Transmisi komunikasi biasanya dilaksanakan melalui mekanisme *Top-Down* dimana komunikasi dan pemberian informasi dimulai dari pusat ke daerah, dari pimpinan tertinggi provinsi Sultra ke instansi-instansi terkait di bawahnya, atau dari instansi yang menangani suatu masalah/kasus ke instansi-instansi lain yang terkait dengan masalah/kasus tersebut. Kasus-kasus penyelundupan narkoba dan/atau bahan pembuat narkoba,²⁰ rokok ilegal dan balpres,²¹ dan/atau masuknya TKA ilegal asal China²² dapat dijadikan contoh dari lemahnya transmisi komunikasi di antara sepuluh entitas atau instansi di atas.

2. Kejelasan komunikasi. Informasi yang diterima oleh *implementer* di lapangan tidak boleh ambigu

²⁰ Wiwid Abid Abadi & F. Attamimi. (2019). Peredaran Narkoba di Sulawesi Tenggara Meningkat pada 2019. Retrieved March 10, 2020, from <https://kumparan.com/kendarinesia/peredaran-narkoba-di-sulawesi-tenggara-meningkat-pada-2019-1sWFomgvfq>

²¹ Pandi. (2019). Bea Cukai Kendari Tindak 71 Kasus Kerugian Negara Rp 1,5 Miliar. Retrieved March 10, 2020, from

<https://inilahsultra.com/2019/12/19/bea-cukai-kendari-tindak-71-kasus-kerugian-negara-rp-15-miliar/>

²² Budi Raharjo. (2018). Ombudsman Diminta Jelaskan Soal TKA Ilegal di Kendari. Retrieved March 10, 2020, from <https://republika.co.id/berita/p7snjk415/ombudsman-diminta-jelaskan-soal-tka-ilegal-di-kendari>

atau membingungkan. Tupoksi/peran, kewenangan, dan wilayah kerja (di darat atau laut) kesepuluh instansi tersebut masing-masing memiliki payung hukum yang jelas. Informasi-informasi yang diterima oleh satu atau lebih instansi tersebut harus memiliki derajat *clarity* atau kejelasan yang tinggi. Kejelasan informasi ini harus dikomunikasikan dan dimulai dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang kemudian ditransmisikan ke instansi-instansi terkait yang merupakan *implementer* atau pelaksana kebijakan di lapangan. Sebagai contoh, jumlah riil TKA asal China di dua tambang nikel terbesar di provinsi Sultra (PT. IMIP dan PT. VDNI) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta instansi terkait seperti Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari harus jelas.²³ Kesimpangsiuran data jumlah riil TKA asal China di dua tambang tersebut

menunjukkan kejelasan komunikasi yang kurang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (dalam hal ini Pemprov. Sultra), legislator daerah (dalam hal ini DPRD Prov. Sultra), dan sepuluh instansi di atas sebagai *implementer* di lapangan.

3. Konsistensi komunikasi. Konsistensi komunikasi sama pentingnya dengan dua subfaktor komunikasi diatas. Keselarasan dan kesesuaian informasi merupakan dua faktor kunci dari seberapa konsistennya sebuah informasi dikomunikasikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan kemudian diteruskan oleh pemerintah daerah ke instansi-instansi terkait dibawahnya dan entitas-entitas terkait lainnya di daerah sesuai dengan otoritasnya masing-masing. Penyelundupan balpres di dan melalui perairan provinsi Sultra merupakan contoh dari tidak

²³ Muhammad Harianto & Hernawan Wahyudono. (2020). Di Sultra, TKA asal China yang terdaftar sebagai pekerja hanya puluhan. Retrieved March 11, 2020, from Antara

website:
<https://sultra.antaranews.com/berita/323291/di-sultra-tka-asal-china-yang-terdaftar-sebagai-pekerja-hanya-puluhan>



Gambar 3. Tempat Penjualan Balpres di Kota Kendari
Sumber: Foto pribadi informan di kota Kendari, 2020

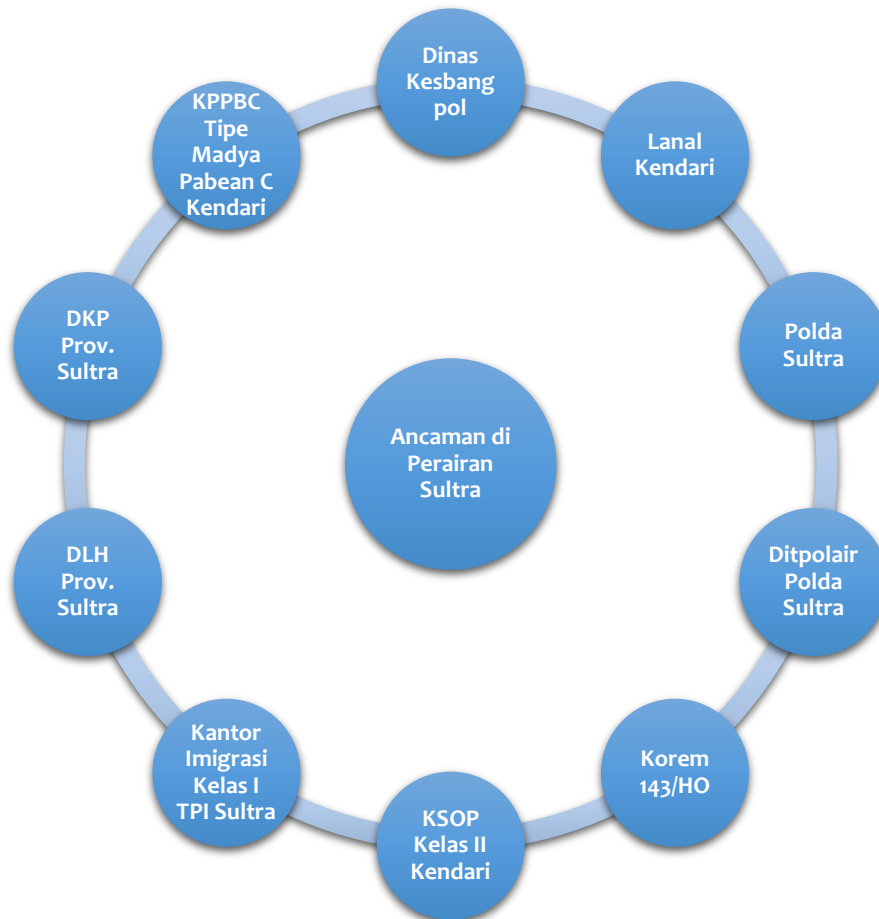
konsistennya komunikasi. Informan atau narasumber B1 dan B2 menyatakan dengan jelas bahwa tidak tercatat adanya kasus penyelundupan balpres di provinsi Sultra atau di kota Kendari. Akan tetapi, dengan menggunakan teknik *snowball*, informan-informan lain di instansi tempat B1 dan B2 bekerja menyatakan dengan jelas bahwa masih sering terjadi penyelundupan balpres di provinsi Sultra dan kota Kendari. Selanjutnya, informan-informan lepas atau mandiri lainnya dari seputar kota Kendari

menyetujui bahwa penyelundupan balpres masih sering terjadi dan bahkan dijual bebas di seputar kota Kendari. Beberapa media massa, baik itu media massa *mainstream* maupun media massa online juga turut mencatat dan mempublikasikan penyelundupan-penyelundupan balpres yang terjadi di perairan Sultra.²⁴

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di provinsi Sulawesi Tenggara, peningkatan komunikasi (transmisi komunikasi, kejelasan komunikasi, dan konsistensi

²⁴ Ruslan. (2019). Bea Cukai Kendari Bongkar Penyelundupan Ratusan Balpress Barang Bekas. Retrieved March 11, 2020, from Media Kendari website:

<https://mediakendari.com/bea-cukai-kendari-bongkar-penyelundupan-ratusan-balpress-barang-bekas/39828/>



Gambar 4. Lingkaran Komunikasi Tak-Terputus

Sumber: Penulis, 2020

komunikasi) antara Dinas Kesbangpol, Lanal Kendari, Korem 143/HO, Polda Sultra, Ditpolair Polda Sultra, KSOP Kelas II Kendari, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Sultra, DLH provinsi Sultra, DKP provinsi Sultra, dan KPPBC tipe Madya Pabean C Kendari harus diimplementasikan secara intensif dengan menggunakan saluran-saluran formal maupun informal. Kesepuluh entitas atau instansi tersebut memiliki peran yang sama pentingnya dalam upaya untuk meningkatkan strategi pertahanan laut dan perairan provinsi Sultra yang akan berdampak langsung secara positif terhadap keamanan dan ketahanan daerah atau

provinsi dalam skala kecil dan negara dalam skala yang luas. Cara-cara dan saluran-saluran berkomunikasi yang sudah ada dan sedang berlangsung saat ini tetap dipertahankan. Namun, transmisi, kejelasan, dan konsistensi komunikasi perlu ditingkatkan secara lebih cair, intens, dan intensif dengan tetap berpedoman pada kewenangan masing-masing entitas sesuai regulasi yang memayungi setiap entitas, sehingga diperoleh model komunikasi seperti di bawah ini.

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan

Untuk meningkatkan keamanan dan pertahanan perairan provinsi Sulawesi Tenggara, diperlukan implementasi strategi yang tepat dalam menghadapi ancaman di dan melalui perairan provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini sangat penting dilakukan karena wilayah perairan atau laut provinsi Sulawesi Tenggara lebih luas dari pada wilayah daratannya. Dengan begitu, ruang hidup dan kehidupan masyarakat provinsi Sulawesi Tenggara yang notabene atau mau tidak mau mengandalkan laut dapat terjamin keberlangsungannya dari ancaman-ancaman yang berasal atau melalui perairan provinsi Sulawesi Tenggara. Posisi provinsi Sulawesi Tenggara yang cukup strategis, karena sangat berdekatan dengan ALKI III dan menjadi lalu lintas dari utara (Filipina) ke selatan (Timor Leste dan Australia) atau sebaliknya, menjadikannya rentan terhadap penyelundupan barang-barang ilegal, menjadi lokasi transit penyelundupan barang-barang ilegal, atau menjadi alur pelintasan barang-barang ilegal. Selain barang-barang ilegal, FTF dan kejahatan yang termasuk dalam kategori TOC dapat ikut serta di dalamnya. Hal ini didukung dengan

wilayah laut provinsi Sultra yang luas dan banyaknya jumlah pulau akan semakin sulit diawasi secara optimal apabila tidak diterapkan strategi pertahanan laut yang efektif dan efisien.

Oleh karena setiap entitas memiliki perundang-undangannya masing-masing, sebagai rekomendasi untuk menjalin komunikasi secara formal dibutuhkan *Memorandum of Agreement (MoU)* atau Nota Kesepahaman kesepuluh entitas tersebut. Sekalipun sudah ada Forkopimda sebagai forum formal di provinsi Sultra, kebutuhan untuk membuat MoU tetap diperlukan untuk menjadi jembatan bagi entitas-entitas atau instansi-instansi seperti KSOP Kelas II Kendari, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Sultra, dan KPPBC tipe Madya Pabean C Kendari yang tidak termasuk dalam Forkopimda provinsi Sultra tetapi memainkan peran yang sangat penting di lapangan. Minimal ada dua alternatif pembuatan MoU; pertama, membuat sekaligus satu MoU untuk sepuluh entitas tersebut; dan kedua, membuat MoU secara bertahap antara satu entitas dengan satu entitas lain atau beberapa entitas-entitas lainnya. Alternatif pertama sepertinya sangat efektif dan efisien, tetapi tingkat kesulitannya sangat besar karena alasan ego sektoral, kepentingan,

dan kedekatan bathin pasti akan menjadi penghambat pembuatan satu MoU yang dilakukan sekaligus dalam kurun waktu yang lebih singkat, yaitu satu kali pembuatan MoU. Sedangkan alternatif kedua hanya memiliki satu hambatan, yaitu pembuatan MoU untuk mencakup keseluruhan sepuluh entitas memerlukan waktu yang lebih panjang. Akan tetapi, hambatan-hambatan seperti ego sektoral dan kepentingan dapat diatasi dengan lebih mudah karena setiap entitas yang menjalin MoU dengan entitas lain biasanya sudah memiliki kedekatan bathin dan profesi yang serupa. Seperti contohnya MoU antara Lanal Kendari, KSOP Kelas II Kendari, dan DKP provinsi Sultra sangat memungkinkan untuk dibuat secepatnya karena ketiga entitas atau instansi tersebut sama-sama bertugas di laut, Kepala KSOP Kelas II Kendari adalah personel TNI AL aktif, pimpinan DKP provinsi Sultra sangat menghargai peran TNI AL dalam menjaga keamanan laut dan pemberdayaan masyarakat maritim, dan Lanal Kendari memahami betul peran DKP provinsi Sultra serta sudah bekerjasama dalam pemberdayaan masyarakat maritime dan peran KSOP Kelas II Kendari di Pelabuhan Nusantara Kendari maupun di alur pelayaran provinsi Sultra. Selanjutnya,

entitas-entitas atau instansi-instansi lainnya dapat saling berkomunikasi dan mendekatkan diri untuk membuat MoU mengikuti langkah entitas atau instansi yang sudah mempunyai kedekatan bathin dan kesepahaman. Pada akhirnya, diharapkan kesepuluh entitas tersebut dapat saling bekerjasama dan berkomunikasi dalam satu ikatan MoU untuk menghadapi ancaman di perairan provinsi Sulawesi Tenggara.

Daftar Pustaka

Buku

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.

Website

- Abadi, W. A., & Attamimi, F. (2019). Peredaran Narkoba di Sulawesi Tenggara Meningkat pada 2019. Retrieved March 10, 2020, from <https://kumparan.com/kendarinesia/peredaran-narkoba-di-sulawesi-tenggara-meningkat-pada-2019-1sWFomgvfq>
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari. (2020). Tujuan. Retrieved March 9, 2020, from Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari website: [100 | Jurnal Strategi Pertahanan Laut | Volume 5 Nomor 3 Tahun 2019](https://dkp-</p></div><div data-bbox=)

- kendari.info/halaman/tujuan
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara. (2020). Tupoksi. Retrieved March 9, 2020, from Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara website: http://dlh.sultraprov.go.id/?page_id=163
- Dispen Lantamal VI. (2020). Komandan Lanal Kendari Memimpin Penyambutan Kedatangan KRI Fatahilah-361 di Kendari. Retrieved March 9, 2020, from <https://koarmada2.tnial.mil.id/2019/04/03/komandan-lanal-kendari-memimpin-penyambutan-kedatangan-kri-fatahilah-361-di-kendari/>
- Harianto, M., & Wahyudono, H. (2020). Di Sultra, TKA asal China yang terdaftar sebagai pekerja hanya puluhan. Retrieved March 11, 2020, from Antara website: <https://sultra.antaranews.com/berita/323291/di-sultra-tka-asal-china-yang-terdaftar-sebagai-pekerja-hanya-puluhan>
- Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari. (2020). Tugas dan Fungsi Imigrasi. Retrieved March 9, 2020, from Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari website: <https://kendari.imigrasi.go.id/index.php/profil/tugas-fungsi>
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Kendari. (2020). Tugas dan Fungsi DJBC. Retrieved March 9, 2020, from Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Kendari website: http://bckendari.id/Pages/tugas_fungsi
- KBBI. (2020). Tahan. Retrieved March 10, 2020, from <https://kbbi.web.id/tahan>
- Lasswell, H. D. (1948). *The structure and function of communication in society*. Retrieved from <http://www.irfanerdogan.com/dergiweb2008/24/12.pdf>
- Lykke Jr., A. F. (1989). Defining Military Strategy. *Military Review*, LXIX(5), 2–8. Retrieved from <http://cgsc.contentdm.oclc.org/cdm/singleitem/collection/p124201coll1/id/504/rec/10>
- Pandi. (2019). Bea Cukai Kendari Tindak 71 Kasus Kerugian Negara Rp 1,5 Miliar. Retrieved March 10, 2020, from <https://inilahsultra.com/2019/12/19/bea-cukai-kendari-tindak-71-kasus-kerugian-negara-rp-15-miliar/>
- Penrem 143/HO. (2020). Sejarah Korem 143/Halu Oleo. Retrieved March 9, 2020, from Korem 143/Halu Oleo website: <http://korem143.kodam14hasanuddin-tniad.mil.id/sejarah-2/>
- Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2019. (2019). In *Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara*. Retrieved from <https://sultra.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NzU1OWZmOGQoZjY3ZTBIZWFkZjJiZTFj&xzmn=aHRocHM6Ly9zdWxocmEuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2FoaW9uLzlwMTkvMDgvMTYvNzU1OWZmOGQoZjY3ZTBIZWFkZjJiZTFjL3Byb3ZpbmNpLXN1bGF3ZXNpLXRlbmdnYXJhLWRhbGFtLWFuZ2thLTIwMTkua>
- Raharjo, B. (2018). Ombudsman Diminta Jelaskan Soal TKA Ilegal di Kendari. Retrieved March 10, 2020, from <https://republika.co.id/berita/p7snjk415/ombudsman-diminta-jelaskan-soal-tka-ilegal-di-kendari>
- Ruslan. (2019). Bea Cukai Kendari

Bongkar Penyelundupan Ratusan Balpress Barang Bekas. Retrieved March 11, 2020, from Media Kendari website:

<https://mediakendari.com/bea-cukai-kendari-bongkar-penyelundupan-ratusan-balpress-barang-bekas/39828/>

Sejarah Provinsi Sulawesi Tenggara. (2020). Retrieved from <http://sultraprov.go.id/sejarah>

Silaturahmi Pemprov Sultra Dengan Tokoh Masyarakat, Mahasiswa dan Pelajar Serta Lembaga Perempuan. (2019). Retrieved March 9, 2020, from Provinsi Sulawesi Tenggara website:

http://sultraprov.go.id/berita/silaturahmi_pemprov_sultra_dengan_tokoh_masyarakat_mahasiswa_dan_pelajar_serta_lembaga_perempuan